



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S2 HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA	HKM22 0125	ILMU HUKUM	2 SKS	2	01 Agustus 2021
OTORISASI		DOSEN PENGEMBANG RPS	KOORDINATOR RMK	KAPRODI	
		Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H. NIP 197308042006041001	Dr. Abdul Halim, M.Ag NIP 196706081994031005	Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LL.M. NIP 198709222018031002	
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	CPL-PRODI				
	S-2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika			
	S-3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila			
	S-4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa			
	S-6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan			
	S-7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik			
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri			
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya			
	KU-2	Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur			
	KU-4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.			
	KK-2	Mampu menganalisis (<i>analyse</i>) teori hukum bidang hukum tata negara, perdata, pidana, bisnis, dan hukum internasional secara integratif dengan keindonesiaan dan Kemanusiaan dengan pendekatan multi-disipliner			
KK-3	Kemampuan menerapkan (<i>applied</i>) metode dan logika berpikir dan penalaran hukum (<i>legal reasoning</i>) untuk menyusun legislative drafting, legal opinion, legal audit, legal contract, legal drafting, putusan dan eksaminasi serta dokumen hukum lainnya sebagai solusi atas perkara hukum yang ada dalam masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya				
KK-8					

		Kemampuan mempraktikan keterampilan komunikasi, berfikir kritis dan inovatif, literasi teknologi informasi, kolaborasi dan <i>teamwork, networking</i> , literasi finansial, respek terhadap sesama dan <i>long life learning</i>
	CP-MK	
	1	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
	2	Mahasiswa mampu memahami Keputusan TUN
	3	Mahasiswa mampu memahami Kedudukan PTUN
	4	Mahasiswa mampu memahami Susunan PTUN
	5	Mahasiswa mampu memahami Acara Pemeriksaan persidangan pada PTUN
	6	Mahasiswa mampu memahami Prosedur pemeriksaan di PTUN
	7	Mahasiswa mampu memahami Pemeriksaan dalam PTUN
	8	Mahasiswa mampu memahami Kompetensi PTUN berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
	9	Mahasiswa mampu memahami Administrasi perkara dan persidangan pada PTUN secara elektronik
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meliputi materi: (1) Konsep dasar PTUN; (2) Keputusan TUN; (3) Kedudukan PTUN; (4) Susunan PTUN; (5) Acara Pemeriksaan persidangan pada PTUN; (6) Prosedur pemeriksaan di PTUN; (7) Pemeriksaan dalam PTUN; (8) Kompetensi PTUN berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan (9) Administrasi perkara dan persidangan pada PTUN secara elektronik.	
Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan	1. Konsep dasar PTUN 2. Keputusan TUN 3. Kedudukan PTUN 4. Susunan PTUN 5. Acara Pemeriksaan persidangan pada PTUN 6. Prosedur pemeriksaan di PTUN 7. Pemeriksaan dalam PTUN 8. Kompetensi PTUN berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 9. Administrasi perkara dan persidangan pada PTUN secara elektronik	
Pustaka	1. Mahkamah Agung RI, <i>Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang</i>, Jakarta: MA RI, 2011. 2. Siti Kotijah, <i>Hukum Acara dan Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)</i>, Yogyakarta: CV MFA, 2020. 3. Martitah, Arif Hidayat, Aziz W. Nugroho, <i>PTUN dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan</i>, Semarang: BPFH UNNES, 2018. 4. Zairin Harahap, <i>Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia</i>, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997. 5. Wicipto Setiadi, <i>Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan</i>, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994. 6. Indroharto, <i>Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. 7. Philipus M. Hadjon, <i>et. al.</i>, <i>Pengantar Hukum Administrasi Indonesia</i>, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994. 8. Prajudi Atmosudirjo, <i>Hukum Administrasi Negara</i>, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994. 9. Ridwan H.R., <i>Hukum Administrasi Negara</i>, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010. 10. Safri Nugraha, <i>et. al.</i>, <i>Hukum Administrasi Negara</i>, Jakarta: CLGS FH UI, 2007. 11. Amrah Muslimin, <i>Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi</i>, Bandung: Alumni, 1985. 12. Sjahan Basah, <i>Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia</i>, Bandung: Alumni, 1989.	

	13. Alfred C. Aman, Jr., <i>Administrative Law and Process</i> , Indiana: Matthew Bender & Company, Inc., 2014. 14. Ronald A. Cass, <i>Administrative Law: Cases and Materials</i> , New York: Wolters Kluwer, 2020. 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. 16. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. 17. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. 18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 19. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.						
	Pendukung: 1. Buku ajar yang terkait materi 2. Jurnal-jurnal yang terkait dengan materi 3. Video yang terkait dengan materi						
Media Pembelajaran	Sinkronus dan Asinkronus Synchronous: 1. Zoom 2. Google Meet 3. Microsoft Teams 4. Webex 5. Live Polling 6. Wa Group 7. Cloudx Asynchronous: 1. E-Learning UPNVJ 2. LMS Moodle Kemendikbud 3. Google Classroom 4. Travello 5. Quizziz 6. Youtube 7. Kahoot				Perangkat Keras		
					Laptop, Komputer, Tablet, Smartphone		
Team Teaching	Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.						
Mata Kuliah Syarat	Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara						
Mg ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Metode Evaluasi	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami	Konsep dasar PTUN	• Perkenalan	2 x 50 menit	• Kajian pustaka • Diskusi	Kemampuan menguraikan	10 %

	konsep dasar PTUN yang meliputi negara hukum, tujuan PTUN, dasar hukum PTUN, dan konsep dasar pengaturan PTUN	1. Negara hukum 2. Tujuan PTUN 3. Dasar Hukum PTUN 4. Konsep dasar pengaturan PTUN	• Kuliah interaktif			identitas, deskripsi dan tujuan matakuliah	
2 dan 3	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang meliputi keputusan dan/atau tindakan dalam UU No. 30/2014 tentang AP, pengertian KTUN, keputusan berbentuk elektronis, badan atau pejabat pemerintahan, Pengujian KTUN dalam gugatan PTUN, Kekecualian KTUN	Keputusan Tata Usaha Negara 1. Keputusan dan/atau tindakan dalam UU No. 30/2014 tentang AP 2. Pengertian KTUN 3. Keputusan berbentuk elektronis 4. Badan atau pejabat pemerintahan, 5. Pengujian KTUN dalam gugatan PTUN 6. Kekecualian KTUN	• PBL Tutorial • Studi kasus	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	• Kajian pustaka • Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
4 dan 5	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami kedudukan PTUN yang meliputi kompetensi PTUN, pihak yang berperkara dalam PTUN, gugatan balik atau gugatan rekonvensi, dan pembinaan dan pengawasan PTUN	Kedudukan PTUN 1. Kompetensi PTUN 2. Pihak yang berperkara dalam PTUN 3. Gugatan balik atau gugatan rekonvensi 4. Pembinaan dan pengawasan PTUN	• PBL Tutorial • Studi kasus • Demonstrasi dan Roleplay (LDR)	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	• Kajian pustaka • Diskusi • Studi Kasus	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
6 dan 7	Mahasiswa mampu mengerti susunan PTUN yang meliputi hakim, kode etik dan pedoman perilaku hakim, panitera, sekretaris, juru sita, kekuasaan PTUN	Susunan PTUN 1. Hakim 2. Kode etik dan pedoman perilaku hakim 3. Panitera 4. Sekretaris 5. Juru sita 6. Kekuasaan PTUN	• PBL Tutorial • Studi kasus	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	• Kajian pustaka • Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %

		7. Kompetensi PTUN					
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)						
9	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami acara pemeriksaan persidangan PTUN yang meliputi karakteristik PTUN, gugatan, tenggang waktu menggugat, tempat mengajukan gugatan, intervensi pihak ketiga, dan kuasa hukum	Acara pemeriksaan persidangan PTUN 1. Karakteristik PTUN 2. Gugatan 3. Tenggang waktu menggugat 4. Tempat mengajukan gugatan 5. Intervensi pihak ketiga 6. Kuasa hukum	• PBL Tutorial • Studi kasus • Demonstrasi dan Roleplay (LDR)	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	• Kajian pusaka • Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
10	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami prosedur pemeriksaan di PTUN yang meliputi pengaturan prosedur pemeriksaan perkara, penelitian administrasi di kepaniteraan PTUN, proses dismissal, permohonan beracara dengan cuma-cuma, permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang disengketakan, dan proses pemeriksaan dengan acara cepat	Prosedur Pemeriksaan di PTUN 1. Pengaturan prosedur pemeriksaan perkara 2. Penelitian administrasi di kepaniteraan PTUN 3. Proses dismissal, 4. Permohonan beracara dengan cuma-cuma 5. Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang disengketakan, 6. Proses pemeriksaan dengan acara cepat	• PBL Tutorial • Studi kasus • Demonstrasi dan Roleplay (LDR)	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	• Kajian pusaka • Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
11 dan 12	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami persidangan dalam PTUN yang meliputi	Persidangan PTUN 1. Pemeriksaan Persiapan 2. Pemeriksaan Acara Biasa dalam Sidang Terbuka Untuk Umum 3. Tergugat Tidak Hadir dalam Persidangan 4. Perubahan gugatan 5. Perdamaian 6. Intervensi	• PBL Tutorial • Studi kasus	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	• Kajian pusaka • Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	15 %

		7. Replik 8. Duplik 9. Pembuktian 10. Kesimpulan					
13 dan 14	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami kompetensi PTUN berdasarkan UU No. 30/2014 tentang AP yang meliputi pengaturan PTUN dalam UU AP, perluasan Kompetensi, perluasan pemaknaan KTUN, perluasan subyek hukum, perluasan obyek hukum, Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, edoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Fiktif Positif), pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pemerintah (<i>Onrechmatige Overheidsdaad</i>), dan Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi	Kompetensi PTUN berdasarkan UU AP 1. Pengaturan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. Perluasan Kompetensi 3. Perluasan Pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara 4. Perluasan Subyek Hukum 5. Perluasan Obyek Hukum 6. Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang 7. Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Fiktif Positif) 8. Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pemerintah	• PBL Tutorial • Studi kasus	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	• Kajian pusaka • Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	15 %

RUBRIK PENILAIAN DISKUSI KASUS/ DAN PRESENTASI

No	Aspek yang dinilai	Nilai	Kriteria Nilai
1	Komunikasi a. Mendengarkan secara aktif b. Membantu anggota lain memahami apa yang disampaikan c. Menggunakan Bahasa sopan, jelas d. Menunjukkan rasa percaya diri	4	Terdiri dari 4 aspek
		3	Terdiri dari 3 aspek
		2	Terdiri dari 2 aspek
		1	Terdiri dari 1 aspek
2	Diskusi a. Mengajukan pendapat dan perasaan dengan cara yang konstruktif b. Menunjukkan dukungan terhadap anggota lain c. Berani mengungkapkan pendapat d. Menjawab pertanyaan teman dengan baik	4	Terdiri dari 4 aspek
		3	Terdiri dari 3 aspek
		2	Terdiri dari 2 aspek
		1	Terdiri dari 1 aspek
3	Keterbukaan a. Menyatakan apa yang ingin dipelajari b. Meminta umpan balik terhadap dirinya c. Berespon baik terhadap masukan teman d. Cepat dalam memberikan respon	4	Terdiri dari 4 aspek
		3	Terdiri dari 3 aspek
		2	Terdiri dari 2 aspek
		1	Terdiri dari 1 aspek
4	Perilaku dalam kelompok a. Bersedia menerima tugas dan perilaku khusus b. Menggunakan pengetahuan dan pengalaman anggota lain c. Hasil tugas relevansi dengan bahan d. Berpartisipasi dalam penugasan kelompok	4	Terdiri dari 4 aspek
		3	Terdiri dari 3 aspek
		2	Terdiri dari 2 aspek
		1	Terdiri dari 1 aspek
5	Kemampuan belajar 4.0 1. Memecahkan masalah kompleks 2. Berpikir kritis 3. Kreatifitas 4. Management orang 5. Berkoordinasi dengan orang lain 6. Kecerdasan emosional 7. Keluwesan berpikir 8. Literasi digital 9. Menggunakan informasi	4	Terdiri dari 9 aspek
		3	Terdiri dari 6-8 aspek
		2	Terdiri dari 3-5 aspek
		1	Terdiri dari 1-2 aspek

NILAI: $\frac{\text{Jumlah Nilai}}{24} \times 100$

RUBRIK PENILAIAN TUGAS PRESENTASI PAPER/MAKALAH

GRADE	SKOR	INDIKATOR KINERJA
Sangat kurang	<20	Tidak ada ide yang jelas untuk menjawab pertanyaan dalam topik bahasan
Kurang	21–40	Ada ide yang dikemukakan, namun kurang sesuai dengan pertanyaan dalam topik bahasan
Cukup	41– 60	Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai, namun kurang inovatif
Baik	61- 80	Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan masalah, inovatif, cakupan tidak terlalu luas
Sangat Baik	>81	Ide, jelas, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan luas

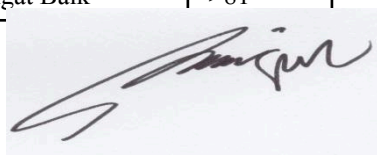
RUBRIK PENILAIAN TUGAS SIMULASI PENYELESAIAN KASUS HUKUM

No	Aspek yang dinilai	Nilai	Kriteria Nilai
1	Berkas	50 %	Kedalaman dan ketepatan analisis
			Kerapihan
			Penggunaan bahasa
			Gaya selingkung
			Kerjasama tim
2	Performance	50 %	Kelancaran
			Bahasa yang digunakan
			Manner
			Responsive
			Kerjasama tim

GRADE	SKOR
Sangat kurang	<20
Kurang	21–40
Cukup	41– 60
Baik	61- 80
Sangat Baik	>81

Jakarta, 01 Agustus 2021

Dosen Pengembang RPS,



Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.
NIP 197308042006041001

Penelaah,
Gugus Kendali Mutu



Siti Nurul Intan S.D, S.H., M.Kn.
NIDN 0006108701

Disetujui,
Kaprosdi S2 Hukum



Dr. Peni Harmoni Harefa, SH, LL.M
NIP 198709222018031002